



PUTUSAN

NOMOR: 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara gugat Cerai, antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dimuka sidang serta saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Buku Register Perkara Gugatan, Nomor 1704/Pdt.G/2011/ PA.Cbn. tanggal 13 Desember 2011, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai:

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2004, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/2004 tanggal 03 Oktober 2004;

Halaman 1 dari hal. 11 Put. No. 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 7 Tahun;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor.;

Bahwa semula/sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya dirasakan oleh Penggugat adalah sudah tidak nyaman, meski terlihat rukun dan harmonis. Rumah tangga mulai semakin terasa goncangannya pada tanggal 2 bulan juli tahun 2010 yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki Wania Idaman Lain.

Tergugat tidak membrikan nafkah lahir dan bathin

Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 25 januari 2010 , dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar bisa menyamakan visi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pesidangan sebagaimana Berita Acara panggilan Nomor: 1704/Pdt.G/2011/ PA.Cbn., ter tanggal 29 Desember 2011 dan 12 Januari 2012, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun membinan rumah tangga kembali dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. : xxx/xx/IX/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, tanggal 03 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing- masing mengaku bernama:

Halaman 3 dari hal. 11 Put. No. 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--

bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat merupakan kakak ipar saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak setahun terakhir ini

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang, dan kalau pulangpun hanya menengok anak dan hanya sebentar, dan sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk mengajak memperbaiki rumah tangganya; -

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat merupakan adik ipar saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selanjutnya goyah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak setahun terakhir ini

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat untuk mengajak rukun ; - -

Halaman 5 dari hal. 11 Put. No. 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil -

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-

bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan -nya yang menyatakan tetap pada pendirian semula yaitu bercerai dengan Tergugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, dan segala permasalahan keluarga dengan Tergugat diselesaikan dengan cara damai, dan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga kembali dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1999 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula Penggugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, yang disebabkan: Tergugat memiliki Wania Idaman Lain, Tergugat tidak membrikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat di persidangan, keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan serta berdasar kepada bukti P.1 berupa Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, ke dua orang saksi tersebut dari keluarga Penggugat yang diwakili oleh Adik kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, dari keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya

Halaman 7 dari hal. 11 Put. No. 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus, yang disebabkan, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan kalau pulangpun hanya sebatas menengok anak, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, sedangkan usaha mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak layakanya seorang suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan tidak memberi nafkah wajib, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menjalankan rumah tangganya kembali tidak mungkin dapat dijalankan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan amar seperti tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat; -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 9 dari hal. 11 Put. No. 1704/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AZID IZUDDIN sebagai ketua Majelis, Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan Dra. N. NINA RAYMALA, Masing-masing sebagai hakim anggota, serta ACENG NASRUDIN, S.H.I, Sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

T

td,

DRS. AZID IZUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H
NINA RAYMALA

Dra. N.

Panitera

Pengganti

Ttd.

ACENG NASRUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Biaya Proses	Rp.	30.000,00	
Panggilan	Rp.	225.000,00	
Redaksi	Rp.	5.000,00	
Meterai	Rp.	6.000,00	+
Jumlah			Rp
296.000,00			